



# RENCANA KINERJA

## PENGADILAN AGAMA MUNGKID

### TAHUN 2018



Jl. Soekarno - Hatta, Kota Mungkid,  
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah  
Telp/Fax. (0293) 788257 / 789078  
Email : [pamungkid@gmail.com](mailto:pamungkid@gmail.com) Website : [www.pa-mungkid.go.id](http://www.pa-mungkid.go.id)



## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

Nomor: W11-A30/102/OT.01.2/1/2018

TENTANG

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID TAHUN 2018**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

- Menimbang** :
- a. Bahwa rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Mungkid, sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Pengadilan Agama Mungkid 2015-2019 dan kebijakan Mahkamah Agung, maka perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2018;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Agama Mungkid tentang Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Mungkid tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958 );
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung R.I.;
11. Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 100/KMA/HK.01/MI/2013 tentang hasil Inventarisir dan Telaahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID TAHUN 2018.
- Pertama** : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Mungkid;
- Kedua** : Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan alat untuk menyusun perencanaan tahunan, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak disahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mungkid  
Pada Tanggal : 2 Januari 2018



Drs. H. SAHDIN MUSTAFA, S.H., M.H.  
NIP. 19641016 199303 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN AGAMA MUNGKID  
TAHUN 2018**

**Sasaran Bidang Kepaniteraan**

NO	Uraian	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara;	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding; - Kasasi; - PK	95%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;	10%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu;	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	50%

sejak diputus.

3.	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;	90%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum	90%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi);	5%

#### Bidang Kesekretariatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan kinerja bagian Perencanaan dan keuangan	1. Persentase realisasi anggaran	95%
		2. Persentase kertas kerja anggaran RKA-KL yang berhasil disusun untuk Tingkat Pertama	100%
		3. Presentase jumlah satuan kerja terekonsiliasi akuntansi keuangannya	100%
2.	Peningkatan kinerja bagian umum	1. Persentase usulan penertiban inventaris BMN oleh kuasa pengguna barang	95%
		2. Persentase jumlah bahan pustaka yang diadministrasikan	100%
		3. Presentase jumlah satuan kerja terekonsiliasi akuntansi BMNnya	100%
3.	Peningkatan kinerja bagian kepegawaian	1. Prosentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai	100%

		2. Prosentase administrasi data pegawai	100%
4.	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Prosentase jumlah aparatur yang mampu menyelesaikan Diklat, Workshop, Orientasi dan Pelatihan	100%



Ketua  
Pengadilan Agama Mungkid,

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.  
NIP. 19641016.199303.1.001